



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 3
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Kamis, 12 November 2020
Waktu	: Pukul 09.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audiensi terkait penyampaian aspirasi
Ketua Rapat	: Moh. Arwani Thomafi/Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 1 (satu) Anggota Komisi II DPR RI dari 49 (empat puluh sembilan) Anggota Komisi II DPR RI B. Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara C. Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) D. Komunitas Tenaga Kesehatan untuk Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Kepulauan (DPTK)

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I), dan Komunitas Tenaga Kesehatan untuk Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Kepulauan (DPTK), dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, hari Kamis, 12 November 2020, dibuka pukul 09.30 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Moh. Arwani Thomafi, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I), dan Komunitas Tenaga Kesehatan untuk Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Kepulauan (DPTK), dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, yaitu:

1. Komisi I DPRD Prov Sultra dan Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) menyampaikan permasalahan tenaga honorer K2 dan kebutuhan ASN dan jenis formasi yang dibutuhkan daerah. Aspirasi tersebut merespon pemerintah yang rencananya akan membuka lowongan CPNS dan PPPK Tahun 2021. Terkait pengadaan CPNS dan PPPK, Pemerintah tidak akan membuka lowongan CPNS untuk tenaga administrasi. Karena pada tahun ini, pemerintah akan memprioritaskan tenaga teknis untuk mendukung pembangunan nasional dan potensi daerah. Adapun formasi yang akan menjadi prioritas pemerintah pada tahun depan, yaitu lowongan untuk mengisi **tenaga pengajar atau guru, tenaga kesehatan** yang saat ini masih kekurangan pegawai yang berstatus PNS, dan **tenaga ahli untuk pembangunan**.
2. Terhadap rencana dibukanya lowongan tersebut, mereka memohon kepada Pemerintah untuk tidak membatasi formasi hanya pada tenaga pengajar, tenaga kesehatan, dan tenaga ahli, tapi tenaga administrasi perlu diberikan kesempatan yang sama demi keadilan. Di samping itu, menurut mereka, pemerintah daerah juga masih kekurangan tenaga administrasi.
3. Oleh karena itu, mereka memohon Komisi II DPR RI untuk menyampaikan aspirasi tersebut agar KemenPANRB bisa membuka formasi juga untuk tenaga administrasi.
4. Mereka juga memohon Komisi II DPR untuk mendorong KemenPANRB agar segera menyelesaikan Tenaga Honorer K2 dengan memberikan formasi khusus baik dalam rekrutmen CPNS maupun PPPK.
5. Komunitas Tenaga Kesehatan untuk Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Kepulauan (DPTK) atau biasa dikenal dengan perawat DPTK adalah Pegawai Tidak Tetap (PTT) yang mendapat penugasan khusus sejak tahun 2009 - 2014 berdasarkan SK dari Menteri Kesehatan RI, yang penetapannya dilakukan secara bergelombang. Mereka terdiri dari gabungan beberapa Profesi (selain Bidan dan Dokter), yaitu: Perawat, Gizi, Kesehatan Lingkungan, Laboratorium Medik, Terapis Gigi dan Mulut, Farmasi, Radiologi, Persatuan Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Fisioterapi.
6. Tenaga kesehatan (perawat) DPTK merasa didiskriminasi oleh pemerintah karena selama ini pengangkatan menjadi CPNS melalui jalur khusus hanya untuk Dokter dan Bidan, padahal mereka mendapat penugasan khusus secara bersama-sama. Oleh karena itu, mereka meminta Pemerintah untuk segera menyelesaikan permasalahan tenaga kesehatan DPTK tersebut dengan diberikan jalur khusus pengangkatan mereka sebagai CPNS sebagaimana pengangkatan bidan dan dokter.

III. CATATAN RAPAT

Catatan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Komisi I DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara, Perkumpulan Honorar K2 Indonesia (PHK2I), dan Komunitas Tenaga Kesehatan untuk Daerah Perbatasan, Tertinggal, dan Kepulauan (DPTK), dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, yaitu:

Komisi II DPR RI akan meneruskan aspirasi mereka kepada Kementerian PANRB dan BKN dalam Rapat Kerja/RDP.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 10.20 WIB.

Jakarta, 12 November 2020
KETUA RAPAT

TTD

Moh. Arwani Thomafi
A-467